

OPTIMALISASI PERAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA DALAM MENDUKUNG KINERJA DPRD

Farisya Eka Fitriani¹, Achluddin Ibnu Rochim²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

farisyaeka@gmail.com, didin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kota Surabaya, sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda) menjadi kunci dalam mengatur kehidupan masyarakat, dan Pemerintah Kota Surabaya aktif terlibat dalam inisiatif ini. Penulisan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kota Surabaya dalam mendukung kinerja DPRD. Menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi tugas dan fungsi Sekretariat dalam menyokong DPRD. Hasil penelitian menunjukkan peran krusial Sekretariat DPRD dalam persiapan rapat, penginputan data perundang-undangan, dan penyusunan berkas komisi-komisi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemahaman penulis terhadap peran kunci Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan kinerja DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kata kunci : Pendampingan, Sekretariat, Optimalisasi, DPRD Kota Surabaya

ABSTRACT

Surabaya, as the administrative center of East Java Province, plays a strategic role in regional development. The process of formulating Regional Regulations (Perda) is crucial in governing community life, and the Surabaya City Government actively participates in this initiative. This writing aims to optimize the role of the Surabaya City DPRD (Regional People's Representative Council) Secretariat in supporting the DPRD's performance. Using a descriptive analysis method, this research explores the tasks and functions of the Secretariat in supporting the DPRD. The results of the study highlight the crucial role of the DPRD Secretariat in meeting the preparation needs for meetings, inputting legislative data, and compiling commission files. The conclusion drawn from this research is the author's understanding of the key role of the DPRD Secretariat in optimizing the performance of the DPRD as a representative institution.

Keywords : Internship, Secretariat, Optimization, Surabaya City DPRD

PENDAHULUAN

Kota Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan ibu kota Provinsi Jawa Timur, memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan populasi yang terus berkembang dan sejarah panjang sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, Kota Surabaya memiliki beragam kebutuhan dan tantangan yang memerlukan kerangka hukum yang tepat dan sesuai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan di tingkat daerah. Pada tingkat kota, DPRD Kota Surabaya menjadi lembaga yang strategis dalam menciptakan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi dinamika perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, optimalisasi peran DPRD menjadi suatu keharusan untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan responsif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD Kota Surabaya. Undang-Undang ini menjelaskan peran penting DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, penganggaran dana, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. Penelitian ini akan menggali lebih dalam upaya optimalisasi peran DPRD Kota Surabaya dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah. Fokus utama akan diberikan pada pemahaman lebih mendalam terkait peran legislatif DPRD dalam merumuskan kebijakan

yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian akan mengulas fungsi penganggaran dana oleh DPRD dan bagaimana hal ini memengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat kota.

Artikel ini juga akan membahas peran krusial DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, menyoroti mekanisme dan instrumen yang digunakan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan kota. Dengan merinci peran DPRD yang diamanatkan oleh undang-undang, artikel ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja DPRD Kota Surabaya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tujuan pendampingan ini adalah untuk menyoroti peran Sekretariat DPRD dalam pembuatan Perda dan bagaimana hal ini berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surabaya. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak yang tertarik dalam studi pemerintahan daerah dan proses legislatif di tingkat lokal.

METODE PELAKSANAAN

Metode Penelitian dimulai pada awal bulan Juli 2023. Penulis terlebih dahulu mencari informasi seputar Instansi Pemerintah. Pada tanggal 12 Juni 2023 penulis melakukan kunjungan ke Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 penulis menerima surat pengantar dan penulis mengtarkan langsung ke Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk salah satu persyaratan dari pihak Instansi Pemerintah yang berada di Jalan Yos Sudarso No.18 - 22, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60272. Kemudian Pada tanggal 17 Juli 2023 penulis melaksanakan kegiatan resmi di Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Adapun alur metode pendampingan pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Observasi adalah kegiatan pengamatan secara sistematis dan teliti terhadap suatu objek atau situasi untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut.
2. Diskusi merupakan interaksi yang bertujuan untuk berbagi pandangan, pendapat, dan informasi guna mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik atau masalah.
3. Pembagian tugas adalah proses alokasi tanggung jawab dan pekerjaan kepada pendamping sesuai dengan kemampuan dan tujuan. agar dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan pendampingan.
4. Pelaksanaan adalah tahap di mana menjalankan aktivitas, tugas, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam suatu program pendampingan, dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengalaman, dan pemahaman dalam bidang tertentu.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai sistem pendukung dalam melaksanakan tugas pengawasan. Penelitian akan mencakup analisis mendalam terhadap bagaimana Sekretariat DPRD telah menjalankan fungsi pendukung, termasuk pengelolaan informasi, perencanaan, dan koordinasi yang relevan dengan proses pengawasan DPRD. Evaluasi akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan efisiensi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas pengawasan anggota DPRD, serta identifikasi terhadap kemungkinan perbaikan atau pengembangan sistem yang ada guna meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan peran krusial ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Bagan Alur Kegiatan Pendampingan di DPRD Kota Surabaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretariat DPRD merupakan salah satu komponen yang memiliki nilai yang cukup krusial. Keberadaan sekretariat DPRD yang secara langsung membantu tugas-tugas DPRD maka tentunya ketika kinerja sekretariat DPRD tidak terlaksana dengan maksimal maka tentu saja DPRD pun tidak akan maksimal dalam berperan sebagai perwakilan rakyat di dalam pemerintahan. Kegiatan Pendampingan di DPRD Kota Surabaya melibatkan beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis sebagai pendamping di DPRD Kota Surabaya pada berikut ini:

1. Penyediaan Informasi

Sekretariat bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh anggota DPRD. Ini mencakup data, laporan, riset, dan informasi terkait kebijakan atau isu yang sedang dibahas.



Gambar 2. Mempersiapkan data yang akan digunakan pada saat rapat

2. Persiapan Rapat

Sekretariat terlibat dalam persiapan setiap rapat DPRD dengan menyiapkan ruangan rapat yang akan digunakan untuk berlangsungnya rapat. Hal ini juga melibatkan penyusunan agenda, dokumentasi, dan semua materi yang diperlukan untuk memastikan jalannya rapat dengan lancar.

3. Pengelolaan Jadwal dan Agenda

Sekretariat membantu dalam pengelolaan jadwal dan agenda kegiatan anggota DPRD. Mereka memastikan bahwa anggota DPRD dapat menghadiri semua kegiatan terkait tugas dan tanggung jawab mereka.

**DAFTAR HADIR KOMISI – C
DPRD KOTA SURABAYA**

1

A. DPRD

No.	NAMA	JABATAN	GENDER	TANDA TANGAN
1.	BAKTIONO, S.S.	KETUA	L	1
2.	ANING RAHMAWATI, S.T.	WAKIL KETUA	P	2
3.	Drs. AGOENG PRASODJO, M.Si	SEKRETARIS	L	3
4.	SUKADAR, S.H.	ANGGOTA	L	4
5.	ABDUL GHONI MUKHLAS N'AM, S.PdI	ANGGOTA	L	5
6.	ASRI YUANITA HAQIE, S.E., S.H.	ANGGOTA	P	6
7.	Drs. H. MINUN LATIF, M.Si	ANGGOTA	L	7
8.	ENDY SUHADI	ANGGOTA	L	8
9.	WILLIAM WIRAKUSUMA, S.T., M.Sc.	ANGGOTA	L	9
10.	ELOK CAHYANI	ANGGOTA	P	10
11.	H. SAIFUL BAHRI, S.Ag	ANGGOTA	L	11
12.	Drs. BUCHORI IMRON	ANGGOTA	L	12

Gambar 4. Membuat Daftar Hadir

4. Rapat Paripurna

Saat rapat paripurna staf sekretariat bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran proses dan mendukung kebutuhan anggota DPRD serta penyelenggaraan rapat.

5. Pembuatan Notulensi

Staf sekretariat bertanggung jawab untuk membuat notulensi atau catatan rapat paripurna. Notulensi ini mencakup pokok-pokok pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil, dan hasil-hasil penting dari rapat.



Gambar 6. Penulisan Notulensi

6. Pengarsipan Dokumen

Setelah rapat selesai, staf sekretariat harus mengarsipkan semua dokumen terkait rapat. Ini mencakup dokumen agenda, notulensi, presentasi, dan dokumen lain yang terkait dengan agenda rapat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Sekretariat DPRD Kota Surabaya dalam mendukung kinerja DPRD telah optimal. Namun, optimalitas ini belum sepenuhnya tercermin dalam kedisiplinan dan komitmen staf serta anggota dewan DPRD. Meskipun sistem administratif telah berfungsi dengan baik, terdapat kecenderungan sikap santai dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, yang dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada efisiensi dan produktivitas keseluruhan. Saran yang dapat diberikan yaitu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen staf serta anggota DPRD terhadap

tugas dan tanggung jawab mereka, menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap anggota DPRD melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan rekomendasi langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja para staf sekretariat dan anggota dewan DPRD Kota Surabaya dapat mencapai tingkat optimalitas yang sesuai dengan peran strategisnya dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Pratiwi, Nofaziah. 2023. "PERANAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH."
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa 1-7.